

## **Pengaruh *Whistleblowing System* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan *Fraud***

**Widya Puspitanisa<sup>\*</sup>, Pupung Purnamasari**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*widyapuspitanisa49@gmail.com, pupung@unisba.ac.id

**Abstract.** The purpose of this research is to see if the Whistleblowing System and Human Resource Competence affect Fraud Prevention. This research objek are the whistleblowing system, human resource competence, and fraud prevention. The subject in this study were employees of the Bandung Regency Social service. The study employs a quantitative approach and employs descriptive verification as a research method. This study relies on primary data gathered using questionnaires and the approach of incidental sampling. The 38 statement questions in this study questionnaire are separated into three variables: 9 statement items for the whistleblowing system variable, 18 statement items for the human resource competency variable, and 11 statement items for the fraud prevention variable. There are 55 respondents in the sample, all of whom work for the Bandung Regency Social Service. Multiple linear regression analysis was used to analyze the data. According to the results of research, the whistleblowing system and human resource competency have a substantial impact on fraud prevention.

**Keywords:** Whistleblowing System, Human Resource Competence, Fraud Prevention

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Whistleblowing System dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Fraud. Objek penelitian ini yaitu whistleblowing system, kompetensi sumber daya manusia, dan pencegahan fraud. Subjek dalam penelitian ini pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Metode penelitiannya yaitu deskriptif verifikatif dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, dan metode incidental sampling. Kuesioner penelitian ini terdiri atas 38 item pernyataan yang dibagi ke dalam tiga variabel yaitu 9 item pernyataan untuk variabel whistleblowing system, 18 item pernyataan untuk variabel kompetensi sumber daya manusia, dan 11 item pernyataan untuk variabel pencegahan fraud. Adapun sampelnya yaitu sebanyak 55 responden yang merupakan pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Peneliti menggunakan teknik Analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan jika whistleblowing system dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud.

**Kata Kunci:** Whistleblowing System, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pencegahan Fraud

## A. Pendahuluan

Instansi pemerintah memiliki kontribusi yang besar dalam pencapaian tujuan suatu pemerintahan. Salah satunya dinas sosial yang disingkat Dinsos merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang sosial untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (Pasal 1 PERBUP No.101 tahun 2018). Namun pada kenyataannya banyak Instansi Pemerintah yang melakukan kecurangan sehingga merugikan negara hanya untuk memperkaya diri sendiri yang dikerjakan dengan sengaja atas aset pemerintah dengan memanfaatkan jabatan.

Kasus kecurangan yang di Indonesia yaitu kasus korupsi Menteri sosial Juliari Peter Batubara berawal dari bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial RI tahun 2020 senilai ± Rp 5,9 triliun, Ada 272 kontrak dan dilakukan sebanyak 2 periode. Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono ditunjuk oleh Juliari sebagai PPK pada proyek itu, yang dilakukan secara tunjuk langsung oleh para rekanan. Pelaksanaan bantuan sosial sembako tahap pertama juliari memperoleh *fee* sebesar Rp12M dimana dibagikan langsung oleh Matheus melalui Adi dengan nominal berskisar Rp8,2M. Pada tahap kedua bantuan terhimpun dana dari bulan Oktober-Desember 2020 dengan nominal kurang lebih Rp8,8M rencana digunakan untuk keperluan pribadi Juliari (firli,2020). Hal ini telah melanggar UU Nomor 20 Tahun 2001 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP (cnnindonesia.com, 2020; news.detik.com, 2020).

Hal itu sesuai dengan yang dipublikasikan oleh ACFE terkait *Report to the Nations 2020* dan Survei *Fraud* Indonesia memperlihatkan pelaku *fraud* terbanyak ialah pegawai. Tuanakotta (2012) menyatakan bahwa *whistleblowing* mampu andil dalam pencegahan fraud. Sehingga muncul keenganan dalam kecurangan karena percaya pada sistem pelaporan yang efektif. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Agusyani (2016), Suharto (2020), Lianto (2020) mununjukan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Artinya semakin efektif *whistleblowing system* maka semakin baik pula dalam pencegahan *fraud*.

Kecurangan terjadi juga pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terdeteksi sejak gagal bayar produk Saving Plan pada Oktober 2018. Hasil investigasi menunjukkan adanya penyimpangan yang berindikasi *fraud* dalam mengelola saving plan dan investasi. Potensi *fraud* disebabkan oleh aktivitas jual beli saham dalam waktu yang berdekatan untuk menghindari pencatatan *unrealized loss*. Kemudian, pembelian dilakukan dengan negosiasi bersama pihak-pihak tertentu agar bisa memperoleh harga yang diinginkan. (cnbcindonesia.com, 2020; Kompas.com, 2020).

Selain dengan penerapan *whistleblowing system* untuk pencegahan *fraud* BPKP (2019: 79) menyatakan bahwa untuk mencegah kecurangan diperlukan SDM yang kompeten dan berintegritas. Oleh sebab itu dibutuhkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sehingga penerapan pencegahan *fraud* baik dan sesuai tujuan. Adanya kemampuan dan kompetensi yang sangat beragam ini harus dilatih untuk memenuhi kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan pada implementasi tugas sehingga *competency gap* dapat dikurangi. Hal ini didukung oleh penelitian penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Rasmini (2019), Ariastini (2018) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Dari pernyataan yang sudah dijelaskan diatas, bisa ditarik kesimpulan jika *whistleblowing system* dan kompetensi sumber daya manusia sangat penting bagi pencegahan fraud. Dalam hal ini penulis akan menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner. Subyek penelitiannya yaitu pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Dari pernyataan diatas, penulis mempunyai ketertarikan mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Whistleblowing System* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan *Fraud* (Survei pada pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung)”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

- Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap pencegahan *Fraud*

## B. Metodologi

Objek penelitian ini adalah *whistleblowing system*, kompetensi sumber daya manusia, dan pencegahan *fraud*. Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner atau angket. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan teknik *non probability sampling*. Jenis *non probability sampling* yang dipilih yaitu teknik *incidental sampling*. Adapun sampelnya yaitu sebanyak 55 responden pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

## C. Pembahasan dan Diskusi

Peneliti membagikan kuesioner kepada pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung sebanyak 70 dan yang kembali ada 55 kuesioner.

Analisis regresi berganda digunakan dalam menganalisis hipotesis yang diajukan. Adapun hasil dari pengujiannya yang dilakukan dengan bantuan SPSS 23.

**Tabel 1.** Hasil Regresi Linear Berganda

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |                           |       |      |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                           |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1                         | (Constant) | 1.668                       | 3.943      |                           | .423  | .674 |
|                           | WS         | .740                        | .135       | .594                      | 5.500 | .000 |
|                           | KSDM       | .177                        | .083       | .230                      | 2.128 | .038 |

a. Dependent Variable: PF

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS,2021

$$PF = 1,668 + 0,740WS + 0,177KSDM + e$$

Keterangan:

PF: Pencegahan *Fraud*

WS: *Whistleblowing System*

KSDM : Kompetensi Sumber Daya Manusia

e: *Error*

Menurut persamaan diatas, setiap variabelnya bisa dijelaskan seperti dibawah ini:

- Nilai konstantanya **1,668** artinya jika variabel *Whistleblowing System* (X1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) nilainya 0 (nol) atau tidak ada peningkatan nilai, maka Pencegahan *Fraud* (Y) nilainya adalah **1,668**.
- Koefisien regresi *Whistleblowing System* adalah **0,740**, artinya jika X1 mengalami peningkatan 1 point sementara variabel lainnya sama, maka Pencegahan *Fraud* (Y) mengalami peningkatan **0,740**.
- Koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia adalah **0,177**, artinya jika kompetensi sumber daya manusia mengalami peningkatan 1 point sementara variabel lainnya sama, maka Pencegahan *Fraud* (Y) mengalami peningkatan **0,177**.

**Tabel 2.** Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |        |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1                  | Regression | 988.538        | 2  | 494.269     | 30.372 | .000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 846.240        | 52 | 16.274      |        |                   |
|                    | Total      | 1834.778       | 54 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: PF

b. Predictors: (Constant), KSDM, WS

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS,2021

Tabel uji F membuktikan bahwa *Whistleblowing System* (X1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai signifikansi sebesar  $0.000 \leq 0.05$  yang artinya hipotesisnya diterima.

**Tabel 3.** Uji Secara Parsial (Uji t)

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant) | 1.668                       | 3.943      |                           | .423  | .674 |
| WS           | .740                        | .135       | .594                      | 5.500 | .000 |
| KSDM         | .177                        | .083       | .230                      | 2.128 | .038 |

a. Dependent Variable: PF

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS,2021

Hasil tabel uji t terlihat jika ada pengaruh antara variabel *whistleblowing system* (X1) terhadap pencegahan *fraud* (Y) dikarenakan mendapatkan nilai signifikansi 0.000 yang artinya nilai signifikansinya  $< 0.05$  dan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) ada pengaruh terhadap variabel (Y) dikarenakan nilai signifikansi yang didapatkan adalah 0,038 yang artinya nilai signifikansinya  $< 0,05$ .

**Tabel 4.** Koefisien Determinasi Regresi Linear Berganda

**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .734 <sup>a</sup> | .539     | .521              | 4.03409                    |

a. Predictors: (Constant), KSDM, WS

b. Dependent Variable: PF

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS,2021

$$Kd = 0,539^2 \times 100\% = 53,9\%$$

Koefisien determinasi dari perhitungan tabel diatas memperoleh nilai 0,539. Hal ini menunjukan bahwa 53,9% pencegahan *fraud* di Dinas Sosial Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh variabel *whistleblowing system* dan kompetensi sumber daya manusia, sedangkan sebanyak 46,1% sisanya yang dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel independent lainnya seperti moralitas individu dan pemanfaatan teknologi informasi.

**Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud***

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2017:2) salah satu manfaat dari penyelenggaraan *whistleblowing system* yang baik adalah timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif. Keberadaan *whistleblowing system* tidak hanya sebagai saluran pelaporan kecurangan yang terjadi, namun juga sebagai bentuk pengawasan. Serta efektif dalam mendorong keikutsertaan pegawai agar lebih berani bertindak dengan melaporkannya ke pihak yang berwenang (Hikmah et al, 2018)

Hasil pengujian hipotesis menunjukan nilai signifikan yang didapatkan oleh variabel *whistleblowing system* sebesar 0,000 yang berarti nilai *sig.*  $< 0,05$ . Nilai tersebut menunjukan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima, dengan kata lain bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Artinya, semakin efektif *whistleblowing system* maka semakin baik dalam pencegahan fraud sehingga kecenderungan untuk melakukan fraud di Dinas Sosial Kabupaten Bandung rendah.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2017), Agusyani (2016), Suharto (2020), Lianto (2020) yang menunjukan bahwa *whistleblowing system* secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan *Fraud***

Pencegahan *fraud* tidak terlepas dengan kompetensi sumber daya manusia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2019: 79) menyatakan bahwa untuk mencegah kecurangan diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki integritas yang tinggi. Karena itu diperlukan peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia agar implementasi pencegahan *fraud* dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Hal ini terbukti dari hasil pengujian parsial (uji-t) yaitu nilai signifikan yang didapatkan oleh variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,038 yang berarti nilai *sig.* < 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima, dengan kata lain bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Artinya, semakin baik atau tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia maka semakin tinggi tingkat pencegahan *fraud*.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ariastini (2018), Dewi & Rasmini (2019), Agusyani (2016) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

#### **D. Kesimpulan**

1. Terdapat pengaruh secara positif signifikan pada *Whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan karena efektifnya *whistleblowing system* sehingga semakin baik dalam pencegahan *fraud* maka kecenderungan untuk melakukan *fraud* rendah.
2. Terdapat pengaruh secara positif signifikan pada Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap pencegahan *fraud*. Yang berarti semakin pegawai memiliki kompetensi sumber daya manusia atau kompeten maka pencegahan *fraud* meningkat tinggi karena dengan tingginya kompetensi seseorang lebih meminimalisir kecurangan yang terjadi.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] ACFE.2020. Indonesia Chapter. Survei Fraud Indonesia. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia Chapter.
- [2] Arens, A. Alvin., Rendall. J. Elder. Mark Beasley., M. S., dan Herman Wibowo. 2016. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*. Edisi 15 Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- [3] BPKP. 2019. Poactive Auditing (Instrumen Pencegahan Fraud). Jakarta: BPKP
- [4] Brown, A.J., et al. 2014. *International Handbook on Whistleblowing Research*. UK: Edward Elgar Publishing limited
- [5] Firli. 2020. Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus Bansos Corona. Tersedia di [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona.\[20/01/2021\]](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona.[20/01/2021])
- [6] Hikmah, Y. N., Oktaroza, M. L., & Purnamasari, P. (2019). *Pengaruh Efektivitas Whistleblowing System dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan* (Survei pada Empat Badan Usaha Milik Negara Sektor Transportasi dan Pergudangan di Kota Bandung).
- [7] Komite Nasional Kebijakan Governance. 2008. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing system – WBS). Jakarta: KNKG
- [8] Lianto, T. W., Purnamasari P. 2020. Pengaruh Whistleblowing System dan Kompetensi Auditor terhadap Pencegahan Fraud
- [9] Putri, Eka Marlina. 2015. Pengaruh Faktor-Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Implementasi Sistem E-Procurement.
- [10] Semendawai, A. H., F. Santoso, W. Wagiman, B. I. Omas, Susilaningtias, and S. M. Wiryawan. 2021. "*Memahami Whistleblower*." Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).